



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1989 SERI D

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keempat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu lebih dimantapkan dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1989-1994 yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah, mempunyai arti khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama-

dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila ;

- c. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu kembali Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984 dan selanjutnya menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1989-1994 yang memberikan kejelasan arah Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dipandang perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang No. 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

4. Keputusan .....

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Dan Badan Perencanaan Pembangunan Tingkat II Dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

**Pasal 1**

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : .....**

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT  
DUA JANGKA PANJANG  
BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KE  
LIMA DAERAH TINGKAT II  
BAB IV : P E N U T U P

**Pasal 2**

Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan dan merupakan arah serta pedoman untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**Pasal 3**

Isi, uraian dan perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini tercantum dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, disusun rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan lain.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 3 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
K E T U A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

ttd.

ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

D I S A H K A N  
Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 27 Juli 1989 No. 188,3/ 227 / 1989  
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
J a w a T e n g a h  
Bidang I  
ttd

Drs. SOENARTEDJO

Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1989  
PJ. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. DJOKO DWIANGGONO S  
NIP. 500031834

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Semarang Seri D  
Nomor 8 Tahun 1989.

**P E N J E L A S A N**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG**

**NOMOR 6 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Tahap IV Tahun 1984-1989 sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang merupakan usaha-usaha pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan, telah mencapai hasil yang positif. Oleh karena itu di dalam tahap berikutnya perlu lebih dimantapkan dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Memasuki tahapan baru pembangunan, untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan daerah disegala bidang yang berlangsung terus menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan REPELITA Nasional.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dimaksud, disusun untuk menjamin agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan serasi dan selaras dengan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional serta merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun

Rencana Pembangunan.....

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dan Rencana-rencana Pembangunan lainnya di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## II. PENJELAS PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang disusun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Nopember 1983 Nomor 050/2104/Bangda, perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan peraturan lain dapat berbentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### Pasal 6

Cukup jelas

**N A S K A H**  
**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**BAB I**  
**P E N D A H U L U A N**

**A. PENGERTIAN**

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah Garis-garis Besar Kebijakan dan Arah Pembangunan di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Tingkat II Semarang sehingga merupakan pedoman penyusunan kebijaksanaan dan program pembangunan disegala bidang dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat di daerah.
2. Arah dan pedoman penyusunan kebijaksanaan dan rangkaian program pembangunan daerah tersebut untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**B. KEDUDUKAN**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang mempunyai kedudukan sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat di Daerah dalam rangka pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara di Kabupaten daerah Tingkat II Semarang.

**C. FUNGSI**

1. Sebagai pemberi arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan tujuan agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten

Daerah Tingkat II .....

Daerah Tingkat II Semarang dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang.

2. Merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, Rencana Kota, Rencana Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program Tahunan Daerah dan Penyusunan Rencana di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

#### **D. SIFAT / KARAKTERISTIK**

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang menyajikan arah dan pedoman kebijaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan kondisi dan potensi wilayah secara lebih kongkrit dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang termasuk kehidupan yang SERASI yaitu sehat, rapi, aman, sejahtera dan indah.
2. Memberikan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang menyangkut seluruh aspek pembangunan yang meliputi arah kebijaksanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah yang terdiri dari kebijaksanaan sektoral dan tata ruang daerah untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah.

#### **F. S U S U N A N**

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdiri dari :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat I Jangka Panjang ;
2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II.

## BAB II

### POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

#### JANGKA PANJANG

##### A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia, telah memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya yakni suatu masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengalami masa perjuangan fisik yang berat yang meminta banyak pengorbanan materiil dan spiritual, pernah pula merasakan akibat-akibat gelombang pertentangan-pertentangan politik yang tajam dan rentetan pergolakan dan pemberontakan sampai dengan yang terakhir Pemberontakan G.30S/PKI terhadap negara dan bangsa pada tahun 1965. Berbagai peristiwa tersebut menimbulkan gangguan terhadap stabilitas Daerah, sehingga usaha-usaha untuk memerangi dan mengatasi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan belum dapat ditangani dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kemerosotan di berbagai bidang yang menambah beban penderitaan rakyat lahir batin.
3. Sejalan dengan keberhasilan perjuangan orde Baru dalam menciptakan Stabilitas Nasional, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berhasil diciptakan keadaan yang mantap sehingga memungkinkan untuk melanjutkan dan meningkatkan usaha pembangunan Daerah diberbagai bidang secara terus - menerus, menyeluruh, terarah dan perpadu, bertahap dan berencana dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Usaha Pembangunan.....

4. Usaha Pembangunan Daerah harus benar-benar merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari hasil pembangunan yang telah dicapai, dengan titik berat pada pengembangan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan selalu mengembangkan sikap realistik yang berpengharapan dan prinsip-prinsip sehat mental sehat pengelolaan, berdaya guna dan berhasil guna serta disiplin yang kuat.
5. Penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya didasarkan atas Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka wawasan Nusantara menuju kepada terwujudnya masyarakat dan wilayah yang berketahanan sebagai suatu kondisi dinamis yang juga mampu mengatasi segala hambatan, rintangan, gangguan, ancaman dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah baik langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan potensi-potensi alamiah maupun sosial serta beraspirasi pada pengertian yang tersurat dan tersirat dalam Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan sesanti Dhamottama Satya Praja yang mengandung aspek-aspek:
  - a. Aspek filosofis dalam kehidupan rakyat, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila, persatuan dan kesatuan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, keagungan, keabadian dan kemuliaan.
  - b. Aspek perilaku keteladanan yang mencakup sikap-sikap kesatrian dan kepahlawanan, kejujuran dan kesucian, keluhuran, keteguhan serta persatuan antara Pemerintah dan Rakyat.
  - c. Aspek fisik sebagai perwujudan (refleksi) antara aspek ideal dan perilaku yaitu yang banyak diwujudkan dalam kebudayaan dan kesenian yang khas Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
  - d. Aspek potensi kekayaan alam yang terkandung di wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang.
  - e. Aspek ruang .....

- e. Aspek ruang dan kedudukan Kabupaten daerah Tingkat II Semarang sebagai bagian dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dibatasi oleh sebelah Utara Kodya Dati II Semarang, Sebelah Selatan Kabupaten Dati II Magelang dan Boyolali, Sebelah Barat Kabupaten Dati II Kendal dan Temanggung, Sebelah Timur Kabupaten Dati II Demak dan Grobogan. Di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdapat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang berbatasan dengan Kecamatan-kecamatan Tuntang, Salatiga, Tengaran dan Getasan.
6. Agar pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah kepada pencapaian tujuan, ditetapkan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang Tahap I yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pelita Daerah/Modernisasi Desa Tahap Pertama, Pelita Daerah/Modernisasi Desa Tahap Kedua, yang selanjutnya disusul dengan Pelita Daerah yang ketiga, keempat dan kelima, sehingga merupakan rangkaian Pelita Daerah yang sambung menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.
7. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang sebagai bagian dari usaha pengarah dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan bangsa pada umumnya dan pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Semarang pada khususnya disusun berdasarkan pada landasan idiil Pancasila landasan Konstitusional UUD 1945, landasan Strutural Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta landasan Operasional GBHN TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Panca Krida Kabinet Pembangunan V dan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan memperhatikan ciri-ciri utama daerah, masalah-masalah khusus, prioritas dan potensi daerah.

8. Pola Umum.....

8. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang merupakan garis-garis besar rencana pembangunan daerah yang meliputi jangka waktu 25 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pedoman, arahan dan bimbingan dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan keterpaduan pembangunan lima tahunan yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969.

## B, KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Sesuai dengan modal dasar dan faktor-faktor dominan sebagaimana tertuang dalam Garis garis Besar Haluan Negara, maka kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang dapat didayagunakan untuk pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

### 1. Kondisi

- a. Letak geografis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang luasnya 982,45 Km<sup>2</sup> diantara 110<sup>o</sup>14' 54,74" - 110<sup>o</sup>39'33,3" Bujur Timur dan 7<sup>o</sup>3'57" - 7<sup>o</sup>30' Lintang Selatan mempunyai posisi strategis, yaitu merupakan salah satu daerah penyangga utama pusat pengembangan kota Semarang dengan kondisi dan potensi ruang wilayah efektif yang telah dicapai selama ini sangat menguntungkan dan membuka kesempatan untuk membangun wilayah dalam satu kesatuan sistem perwilayahan pembangunan Regional dan Nasional.
- b. Dari segi fisiografik keadaan topografi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berupa dataran-dataran dan perbukitan yang landai hingga curam pada ketinggian rata-rata antara 318 m - 1.450 m di atas permukaan air laut serta sebuah danau/rawa-rawa yang cukup luas. Kondisi yang demikian memungkinkan untuk budidaya pertanian. Kurang lebih 74,55 % dari luas wilayah ini dipergunakan sebagai lahan pertanian antara lain berupa sawah, tegalan, perkebunan hutan dan kolam-kolam ikan.
- c. Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada akhir tahun 1986 berjumlah kurang lebih 748.769 jiwa yang terdiri dari 364.364 jiwa (46,67%) laki-laki dan 384.323 jiwa (51,33 %) perempuan. Angka kepadatan penduduk rata-rata adalah 762 jiwa

per Km<sup>2</sup>, sedang.....

pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun selama Pelita IV adalah 0,76 %.

- d. Keadaan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan, dapat tercermin dalam besarnya Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 1986 sebesar Rp.201.678.420.000,- atau Rp.271.193,43 perkapita menurut harga konstan tahun 1983.  
Dalam harga yang berlaku, Produk Domestik Regional Bruto tahun 1986 tersebut sebesar Rp.245.390.130.000,- atau Rp.329.971,80 perkapita.
- e. Keadaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang merupakan gambaran tentang ketahanan Nasional di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang serta kekuatan sosial politik dan ABRI yang tumbuh dari rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat sangat mendukung dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

## 2. Potensi

- a. Sumber daya alam yang mencakup potensi biotik dan non biotik. Potensi biotik meliputi aneka ragam flora baik berupa tumbuhan liar maupun tanaman yang dibudidayakan, serta berbagai jenis fauna berupa hewan besar dan kecil yang ditenakkan maupun yang masih liar
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang cukup mempunyai potensi mineral baik yang sudah diusahakan maupun yang belum. Sumber air yang berupa sungai, danau dan air dalam tanah sudah dimanfaatkan untuk rumah tangga, pertanian, sumber tenaga listrik dan sebagainya.
- c. Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang usia 10 tahun keatas berjumlah 547.486 jiwa (73,12%) dengan penduduk usia produktif (15-59 tahun) sebesar 509.800 jiwa (68,09 %).

Dilihat dari .....

Dilihat dari jumlah penduduk yang cukup besar ini akan dapat menjadi modal utama yang sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan apabila memiliki kualitas serta dibina sebaik-baiknya.

- d. Kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat, kemauan serta kemampuan rakyat untuk terus melaksanakan pembangunan serta sifat-sifat kekeluargaan dan gotong royong merupakan modal yang tidak ternilai harganya dalam pembangunan di Daerah.
- e. Kebudayaan dan kesenian yang telah berkembang selama ini merupakan daya penggerak yang bernilai dalam memberikan corak dan memperkaya kebudayaan kepribadian dan kebanggaan Nasional.

### C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah :

1. Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
2. Menunjang dan merupakan penerapan serta pelengkap dari pelaksanaan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembangunan Nasional di daerah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. Pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka usaha untuk lebih cepat mencapai tujuan pembangunan.
  - b. Peningkatan pendayagunaan .....

- b. Peningkatan pendayagunaan potensi-potensi yang ada berupa sumber daya alam maupun manusiawi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang maka landasan serta azas-azas pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis garis Besar Haluan Negara (TAP MPR NO. II/MPR/1988) dan azas-azas pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Perda Nomor 17 tahun 1988 menjadi landasan serta azas-azas pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

#### **D. ARAH PERMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II JANGKA**

Sejalan dengan pembangunan Nasional Jangka Panjang dan arah pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Jangka Panjang maka arah pembangunan Daerah Kabupaten daerah II semarang Jangka Panjang adalah sebagai berikut :

#### **U M U M**

1. Pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang harus dilaksanakan secara merata keseluruh wilayah.
2. Pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya akan tercapai apabila dijiwai dengan hakekat ketaqwaan dan budi luhur manusia yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan keselarasan cita-cita hidup didunia dan akherat.

3. Pembangunan.....

3. Pembangunan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang yang dilandasi oleh strategi Wawasan Identitas perlu dijabarkan secara lengkap, terpadu, kompak dan berkesinambungan agar dapat mewujudkan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang berketahanan sehingga dapat menunjang terwujudnya Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan.
4. Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahapan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Titik berat pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama tercapainya keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri serta terpenuhinya kebutuhan dasar secara merata baik dipedesaan maupun di perkotaan. Sejalan dengan itu keberhasilan di bidang ekonomi akan terbuka kesempatan yang lebih luas bagi pembangunan di bidang-bidang lainnya.
5. Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang harus mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan pendapatan Nasional serta menjamin rasa keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang merata. Hal ini berarti bahwa pembangunan Daerah harus dapat mencegah melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana, wajar, tenggang rasa dan kesetiakawanan sosial yang akhirnya dapat tercapai keadaan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
6. Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Jangka Panjang diarahkan sebagai bagian nyata dari pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menciptakan stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan daerah dan pembagian hasilnya tidak boleh menimbulkan goncangan-goncangan sosial politik dan ekonomi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa stabilitas Nasional harus memperkuat pembangunan Daerah dan pembangunan Daerah harus memperkuat stabilitas Nasional di Daerah.

#### **KEBIJAKSANAAN BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN**

1. Bidang Ekonomi .....

1. Bidang Ekonomi

- a. Kebijakan pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang diarahkan untuk dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi daerah dimana sektor di luar sektor pertanian secara bertahap harus mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Hal ini akan tercermin dalam nilai sumbangannya terhadap produksi Daerah dan jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya diluar sektor pertanian.
- b. Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang menetapkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang semakin merata. Bersama dengan itu dilakukan upaya-upaya pengembangan kualitas manusia agar dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Kebijakan pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang disamping untuk meningkatkan produksi daerah, maka bersama dengan itu harus dapat mempercepat pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja. Berkenaan dengan itu perlu peningkatan kualitas tenaga kerja yang membawa implikasi terhadap sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Perlu pula pengaturan penawaran tenaga kerja sehingga terdapat keseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja disatu pihak dan peningkatan partisipasi angkatan kerja dilain pihak. Disamping itu perlu pula pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui berbagai macam program/sector.
- d. Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam harus direncanakan sebaikbaiknya dengan tetap mengingat kelestariannya dan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian Pembangunan Daerah Tingkat II tidak akan merusak tata lingkungan hidup manusia dan merugikan generasi yang akan datang. Untuk itu pendayagunaan dan pemanfaatan tanah perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Dengan demikian .....

Dengan demikian perlu pula dikembangkan perencanaan tata ruang dan tata guna tanah, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.

- e. Pembangunan Daerah Tingkat II memerlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan Daerah Tingkat II sendiri Daerah Tingkat I dan kemampuan Nasional. Untuk itu perlu dana tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah dan dana-dana lain dari luar.
  - f. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, menggunakan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan berorganisasi dan manajemen sehingga membawa manfaat bagi Daerah serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan teknologi harus dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja serta memperluas lapangan kerja.
  - g. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan Demokrasi Ekonomi yang berarti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang sehat bagi partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan dengan Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud diatas, tidak tersedia tempat bagi sistem " Free Fight Liberalisme " " Etatisme " maupun pemusatan dan monopoli yang merugikan masyarakat.
2. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.
- a. Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia

harus benar-benar .....

harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan Bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

- b. Bentuk - bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia budaya Indonesia sebagai pendukungnya.
- c. Dalam rangka pembangunan daerah, usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan keharusan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan teknis dan pembinaan kesadaran serta rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan dan terwujudnya kreativitas dan oto aktivitas dikalangan rakyat. Dalam usaha tersebut kesadaran dan kesediaan golongan masyarakat yang lebih maju untuk membantu mereka yang kurang mampu perlu terus ditingkatkan. Dilain pihak sifat-sifat ketergantungan harus makin dikurangi menuju keadaan masyarakat yang lebih mandiri.
- d. Dalam rangka pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Jangka Panjang harus juga terkandung suatu peningkatan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkembangan penalaran manusia serta perubahan sikap mental yang dapat mendorong pembangunan daerah. Berbagai upaya untuk membentuk dan mengarahkan mentalitas manusi yang mengandung serangkaian nilai-nilai budaya sangat diperlukan untuk membudayakan nilai-nilai baru yang timbul, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang akan dicapai harus serasi dengan perubahan orientasi sosial masyarakat kearah pengembangan masyarakat berbudaya perlu lebih digalakkan

dalam .....

dalam menghadapi dampak dari pembangunan daerah itu sendiri.

### **3. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa.**

Dalam bidang politik dimantapkan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan Nasional. Pembinaan Aparatur Pemerintah dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Daerah termasuk Aparatur Desa agar dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan hukum sesuai kemajuan pembangunan disegala bidang.

Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan bangsa harus dapat menjadi sarana untuk membudayakan Pancasila dan UUD 1945 dikalangan masyarakat.

### **4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.**

Sesuai Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional, salah satu syarat mutlak untuk mensukseskan perjuangan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah kondisi yang memungkinkan negara dan rakyat hidup aman dan tentram bebas dari berbagai gangguan dan ancaman. Terciptanya kondisi tersebut memungkinkan negara dan rakyat dapat menyelenggarakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Karena dalam kondisi itu terdapat keselarasan antara kebutuhan jasmani dan tuntutan rohani, terdapat ketentraman dan ketertiban lahir batin serta bebas dari rasa ketakutan dan tekanan.

## **KEBIJAKSAAN TATA RUANG DAERAH (SPATIAL)**

Kebijaksanaan Tata Ruang Daerah lebih diarahkan guna pencapaian optimasi pemanfaatan Daerah yang didasarkan atas kondisi, potensi serta kegiatan Daerah yang diperkirakan akan berkembang.

Pendekatan .....

Pendekatan yang dilakukan, yang didasarkan atas hal-hal tersebut di atas akan meliputi pengamatan yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor Asta Gatra yakni Tri Gatra Alamiah (agrograsi, kekayaan alam dan kependudukan) dan Panca Gatra Sosial (ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan Hankam).

Kebijaksanaan Jangka Panjang lebih diarahkan pada :

1. Kebijakan Pembangunan Desa-Kota berdasarkan pada tingkat hubungan ketergantungan antara Desa dan Kota mengarah pada peningkatan keserasian.
2. Kebijakan Pembangunan menurut Sub Wilayah Pembangunan menggambarkan kedudukan dan kontribusi masing-masing bagian wilayah dalam proses perkembangan. Dengan bertumpu pada struktur dasar yang terbentuk oleh kaidah-kaidah yang berlaku dalam kegiatan manusia yang pada prinsipnya dilandasi usaha pencapaian efisiensi yang sebesar-besarnya dalam hal ini kegiatan mendistribusikan barang-barang primer dari sumber alam sampai ke konsumen akhir, dengan melalui jangkauan kemudahan yang setinggi-tingginya dan pemasaran yang seluas-luasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan pengkajian kebijaksanaan pengembangan wilayah pada saat yang lalu serta pengamatan potensi dan pertumbuhan daerah saat ini, maka masa yang akan datang ditentukan kebijaksanaan dengan 4 (empat) Sub Wilayah Pembangunan yaitu :

- a. Sub Wilayah Pembangunan I : meliputi kecamatan Ungaran.
- b. Sub Wilayah Pembangunan II : meliputi Kecamatan Klepu dan Kecamatan Bawen.
- c. Sub Wilayah Pembangunan III : meliputi Kecamatan Ambarawa, Sumowono Jambu, Banyubiru, Getasan dan Tuntang.
- d. Sub Wilayah Pembangunan IV : meliputi Kecamatan Suruh, Tenganan, Susukan, Salatiga dan Bringin.

3. Kebijakan .....

3. Kebijakan Pembangunan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan sistem keterpaduan kegiatan antar sektor, mengarah pada peningkatan pemanfaatan serta pelestarian lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai yang meliputi :
  - a. Sub Daerah Aliran Sungai Kaligarang ;
  - b. Daerah Aliran Sungai Jratunseluna.

#### **E. CATATAN DASAR**

Pola Umum Pembangunan daerah Tingkat II Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II yang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II, Rencana Tata Ruang Daerah dan Rencana Kota.

**BAB III**  
**POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA**  
**DAERAH TINGKAT II**

**A. PENDAHULUAN**

1. Kaitan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dengan Pola Umum Pelita Kelima Daerah Tingkat II.

a. Hasil yang telah dicapai.

Pelaksanaan Pelita Pertama, Pelita Kedua, Pelita Ketiga dan Pelita Keempat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah mencapai hasil yang nyata, yang manfaatnya telah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yaitu :

- 1) Meningkatnya taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- 2) Terpecahkannya masalah-masalah pokok yang mendesak secara bertahap dengan memperhatikan peningkatan pendayagunaan potensi-potensi yang ada serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Dari hasil pembangunan Pelita Pertama sampai dengan Pelita Keempat tercapailah keadaan yang memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan daerah dalam Pelita Kelima sebagai pelaksanaan tahap Kelima dari Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.

Pola Umum Pelita Kelima Daerah yang meliputi jangka waktu 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994 adalah rencana pembangunan yang disusun berlandaskan pada dan merupakan kesinambungan dari Pelita-pelita sebelumnya, sehingga selain merupakan kelanjutan juga sekaligus peningkatan, perluasan dan pembaharuan segala hasil pembangunan yang telah dicapai disemua sektor pembangunan.

Berdasarkan hasil pembangunan dan dengan belajar dari pengalaman berharga selama pelaksanaan empat Pelita yang

telah berjalan, .....

telah berjalan, maka dengan menyadari tantangan berat yang masih akan dihadapi dalam Pelita Kelima, maka masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang bertekad teguh untuk mencapai sasaran utama pembangunan jangka panjang (25 tahun) pertama sebagaimana ditetapkan dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.

Dalam Pelita Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diusahakan terciptanya landasan yang mantap bagi masyarakat Kabupaten daerah Tingkat II Semarang untuk melaksanakan pembangunan jangka panjang ( 25 tahun ) kedua yang merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang ( 25 tahun ) pertama.

Pada akhir Pelita Kelima harus tercipta landasan yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk tumbuh dan berkembang terus, sehingga pada Pelita Keenam benar-benar dapat tinggal landas dan memacu pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Regional dan Nasional yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada strategi wawasan identitas, selanjutnya dalam Pelita Kelima akan diusahakan peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan yang akan lebih berorientasi pada pembangunan pedesaan dengan tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan dengan penekanan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

b. Masalah-masalah pokok.

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dalam pelita-pelita yang lalu adalah :

1). Kependudukan

- Penyebaran penduduk yang belum merata.
- Masih rendahnya kualitas penduduk terutama tenaga kerja.

- Pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia.
- Pendapatan masyarakat yang tidak merata.

2). Pendidikan :

- Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan terutama Sekolah Lanjutan baik Sekolah Lanjutan Pertama maupun Sekolah Lanjutan Atas.
- Mutu dan kesesuaian pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan pembangunan daerah serta keterbatasan sarana dan prasarana.
- Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum optimal, serta pengembangan sistem informasi yang belum memadai.

3). Keseimbangan Lingkungan dan Kelestarian Alam :

- Terganggunya keseimbangan lingkungan hidup yang mengancam kelestarian sumber alam dan merosotnya kualitas lingkungan.
- Belum mantapnya pendayagunaan sumber-sumber air, tanah dan ruang untuk lebih meningkatkan daya dukung wilayah yang terbatas.

4). Laju pertumbuhan antar wilayah :

- Perbedaan laju pertumbuhan daerah sebagai akibat dari perbedaan penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi yang tersedia serta perbedaan peluang dari kemungkinan pengembangan.

5) Aparatur Pemerintah :

- Kemampuan Aparatur Pemerintah yang masih terbatas, sehingga belum memadai untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan.

- keterbatasan.....

- Keterbatasan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah.
- Pemantapan dan pengembangan organisasi serta kelembagaan, peningkatan tugas dan fungsi, pembinaan dan penyediaan personil dan tata laksana kerja yang belum memadai.

6). Perhubungan dan Pariwisata :

- Arus lalu lintas yang melewati Kabupaten Semarang cukup padat, sehingga banyak menimbulkan kerawanan yang mengakibatkan kurang lancar dan kurang tertibnya lalu lintas. Disamping itu masih terdapat wilayah-wilayah potensial yang belum dapat berkembang karena prasarana perhubungan belum memenuhi.
- Belum ada perencanaan secara terinci maupun menyeluruh tentang obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sehingga pengembangannya kurang terkendali.

2. Penerapan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga pelaksanaannya harus merupakan penerapan, penunjang serta pelengkap dari pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua Sila dalam Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi :

- a. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan daerah sebagai pengamalan dari Pancasila.

b. ....

- b. Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesesaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.
- c. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa disemua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga makin kuat rasa kesetiakawanan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang antara lain mencakup makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas Nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara serta bergairahnya rakyat dalam proses pembangunan politik.
- e. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

## B. T U J U A N

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang maka tujuan Pelita Kelima adalah :

1. Meningkatkan tarah hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin adil dan merata dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan penataan ruang yang serasi.
2. Meletakkan Landasan yang kuat untuk tahap berikutnya dengan:

a. Pertumbuhan ekonomi .....

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin mantap dengan tergalangnya kekuatan ekonomi serta meningkatnya produktivitas total wilayah dan investasi yang semakin produktif, pemupukan modal masyarakat, dunia usaha swasta dan koperasi.
- b. Pelaksanaan demokrasi ekonomi dimana pemerintah lebih berfungsi membina dan mengayomi guna memberikan kesempatan kepada dunia usaha nasional agar lebih berperan melalui penciptaan iklim investasi.
- c. Meningkatkan keadilan manusia yang meliputi ketakwaan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan masyarakat dan kemampuan alih teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas karya, keswadayaan dan kemandirian serta meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
- d. Pengembangan budaya politik Pancasila dengan memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang tercermin dalam keseluruhan semangat dan gerak pembangunan yang dilakukan oleh seluruh kekuatan sosial politik.
- e. Meningkatnya kemampuan menangkal bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta mantapnya kewaspadaan Nasional di daerah dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan dimaksud akan dilanjutkan usaha-usaha pemecahan masalah-masalah pokok yang belum terselesaikan dalam Pelita Keempat dengan memperhatikan peningkatan dan pendayagunaan sumberdaya alam maupun manusia dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya.

### **C. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita Kelima Daerah ialah

#### **U M U M**

1. Melanjutkan .....

1. Melanjutkan dan meningkatkan arah dan kebijaksanaan pembangunan selama Pelita Keempat sehingga terjalin kesinambungan program pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan semakin nyata dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat yang mencerminkan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang dapat memperkokoh ketahanan Nasional di Daerah, dengan berlandaskan pada strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.
  
2. Memantapkan stabilitas politik di daerah, dengan meningkatkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila serta mengusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan Nasional di Daerah, melalui kehidupan rakyat yang meningkat secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum yang selalu ditingkatkan dan di bina terus menerus.  
Sejalan dengan itu demi tegak dan tumbuhnya kehidupan konstitusional yang dilandasi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 maka kekuatan sosial politik khususnya Parpol dan Golkar yang telah berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas harus semakin mampu, mandiri dan mantap dalam membangkitkan peranan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  
3. Meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam usaha mengayomi masyarakat supaya hidup tentram lahir batin dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas dan usaha usaha ini akan mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, meningkatkan kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.  
Untuk itu maka Aparatur Pemerintah di daerah pada umumnya dan Aparatur Penegak Hukum khususnya perlu terus menerus dibina dikembangkan untuk meningkatkan sikap mental, kewibawaan, kejujuran dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban.

4. Memelihara .....

4. Memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin stabilitas Nasional di Daerah dan kelancaran pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah. Untuk itu kesiapan, kewaspadaan dan ketrampilan aparat keamanan terus ditingkatkan disamping usaha-usaha pembinaan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban.
5. Memantapkan stabilitas ekonomi dengan melanjutkan kebijaksanaan ekonomi yang selama ini berhasil baik sehingga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari cukup tersedia tersebar dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat banyak. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup mantap dalam Pelita Kelima Daerah harus dapat dicapai kenaikan produksi barang dan jasa diberbagai sektor yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, jasa-jasa dan lain-lain sehingga memberi sumbangan baik dari segi nilai tambah maupun penciptaan lapangan kerja. Hal itu perlu diusahakan dengan meningkatkan pengerahan dan pendayagunaan sumber daya dan dana, pengembangan kelembagaan termasuk didalamnya peningkatan konsolidasi tata niaga, pendayagunaan teknologi tepat guna serta perluasan kesempatan berusaha.
6. Pelaksanaan Pelita Kelima memerlukan pembiayaan yang memadai baik dari sumber pemerintah maupun masyarakat dengan mengembangkan sumber - sumber dana pembangunan yang ada untuk lebih mewujudkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta mendorong kegiatan investasi bagi sektor swasta.  
Penggunaan dana pembangunan dan investasi harus diarahkan untuk membiayai kegiatan - kegiatan yang benar merupakan prioritas serta lebih ditingkatkan daya guna dan hasil gunanya.
7. Penciptaan lapangan kerja perlu ditingkatkan dan di mantapkan melalui langkah-langkah yang bersifat umum, sektoral, regional maupun khusus. Langkah - langkah yang bersifat umum antara lain meliputi kebijaksanaan pembangunan dalam produksi, investasi, perdagangan, harga, upah dan lain-lain serta kegiatan dibidang pendidikan dan latihan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Langkah-langkah yang bersifat sektoral antara lain meliputi kebijaksanaan pembangunan di sektor-sektor pertanian, industri, jasa dan lain-lain yang berorientasi kepada perluasan kesempatan kerja.

Langkah-langkah yang bersifat regional meliputi upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta pengembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat lebih memanfaatkan seluruh potensi pembangunan tiap-tiap daerah.

Langkah-langkah yang bersifat khusus meliputi berbagai kegiatan memberikan bantuan pembangunan kegiatan padat karya dan lain-lain.

8. Kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan terciptanya angkatan kerja yang mampu dan siap bekerja sehingga dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan kerja dalam pembangunan di Daerah.  
Dalam rangka pemerataan lapangan kerja perlu di tingkatkan berbagai langkah yang meliputi antara lain pendayagunaan angkatan kerja pembinaan golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
9. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk memajukan kecerdasan ketrampilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya serta untuk memantapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk mensesuaikan laju pertumbuhan antar daerah dan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Koordinasi fungsional perwilayahan perlu untuk di tingkatkan dalam rangka pemantapan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang berbatasan.

11. Untuk dapat .....

11. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Daerah dalam Pelita Kelima perlu dipelihara dan dikembangkan partisipasi masyarakat serta peningkatan peranan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terpadu didalam sistem pengembangan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah dalam bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Daerah.
12. Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok masyarakat dengan penghasilan yang masih rendah, seperti buruh tani petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani berlahan sempit, pengrajin dan lain-lainnya. Kebijakan yang memberi kesempatan lebih banyak kepada golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memberikan kepastian usaha, memperkuat permodalan, bimbingan teknologi, peningkatan ketrampilan dan kemampuan berusaha serta memperluas pemasaran.
13. Pendayagunaan dan pemanfaatan tanah perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Untuk itu perlu dikembangkan perencanaan tata ruang dan tata guna tanah sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan sehingga dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan.  
Disamping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.
14. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah yang perlu diatasi karena dapat merupakan beban bagi pembangunan dan mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sekaligus mendayagunakan jumlah penduduk disegala bidang, langkah-langkah dibidang kependudukan

perlu.....

perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lebih terpadu.

15. Dengan makin meningkat dan kompleksnya pembangunan perlu makin ditingkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dilandasi oleh disiplin serta tanggung jawab dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga benar - benar dapat dicapai efisiensi dalam pembangunan.

## **KEBIJAKSANAAN BIDANG - BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI**

### **1. Pertanian**

Pembangunan Pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh.

Pembangunan Pertanian bertujuan meningkatkan hasil dan mutu produksi guna memantapkan swasembada pangan, memenuhi gizi masyarakat, meningkatkan komoditi ekspor, meningkatkan komoditi bahan baku industri dalam negeri, meningkatkan hasil hutan dan ikutannya, meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha maupun kesempatan kerja, serta mendorong peranan swasta dalam upaya mengembangkan potensi pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha optimasi pendayagunaan lahan dengan pengusaha berbagai macam tanaman / komoditi pangan, perkebunan, perkebunan dan kehutanan, berbagai usaha peternakan dan perikanan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi, meningkatkan kemampuan pengusaha dan pengelolaan serta penerapan teknologi yang tepat pada usaha-usaha pertanian.

pembangunan pertanian dilakukan seiring dengan upaya rehabilitasi tanah kritis untuk memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah, sumber air serta kelestarian kemampuan lingkungan.

Pembangunan pertanian perlu didukung oleh tata ruang dan tata

guna tanah .....

guna tanah sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin kemudahan serta kelancaran usaha-usaha pertanian yang sesuai dengan azas adil dan merata.

Sehubungan dengan itu maka perlu dicegah adanya pemilikan tanah oleh perseorangan secara berlebihan dan pemilikan tanah yang sangat kecil sehingga tidak menjadi kan sumber penghidupan yang layak bagi petani.

## 2. P e n g a i r a n

Pembangunan pengairan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan diarahkan untuk menyediakan air irigasi yang cukup bagi peningkatan produksi pertanian, pengamanan wilayah produksi dari kerusakan akibat banjir dan sekaligus memenuhi kebutuhan akan air bagi masyarakat, industri serta kelistrikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilestarikan sumber-sumber air, peningkatan dan pemeliharaan, rehabilitasi prasarana dan sarana pengairan serta perbaikan dan pengaturan sungai.

Dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi yang ada, akan dikembangkan dan ditingkatkan peran serta kelompok tani pemakai air "Dharma Tirta" sejak tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharannya. Demikian pula akan selalu ditingkatkan adanya penyuluhan, penyampaian informasi, pendidikan dan latihan baik kepada petugas maupun petani dibidang pengairan.

## 3. I n d u s t r i

Pembangunan industri diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian dengan penekanan pada pengembangan aneka industri.

Berkembangnya industri sebagai penggerak utama peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan devisa, diupayakan pula melalui pengembangan keterkaitan antara pembangunan sektor industri dengan sektor lain, antara industri besar, menengah dan kecil dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran

serta perusakan .....

serta perusakan lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam. Dalam rangka pembinaan dan pengendaliannya perlu diusahakan dalam memfungsikan Zone Industri dengan pusat pengembangan di Desa Ngempon Kecamatan Klepu. Sehubungan dengan itu maka perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta pengembangan teknologi daur ulang.

#### 4. P e r t a m b a n g a n

Pembangunan pertambangan diarahkan khususnya pada peningkatan usaha-usaha penelitian, pemetaan, identifikasi, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang yang potensial terutama galian C dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan bertujuan untuk meningkatkan investasi usaha pertambangan serta partisipasi Swasta Nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### 5. E n e r g i

Pembangunan tenaga listrik dan sumber energi lainnya diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah Pedesaan maupun Perkotaan.

#### 6. P e r h u b u n g a n

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa, informasi serta meningkatkan mobilitas manusia keseluruh daerah sehingga akan tercapai tingkat kemudahan yang merata dan akan memperlancar pula terhadap roda perekonomian serta menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan.

#### 7. P a r i w i s a t a

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, taraf hidup masyarakat dan mendorong pembangunan daerah dengan lebih meningkatkan peranan, masyarakat, tetap

memelihara.....

memelihara kepribadian dan kebudayaan daerah, memupuk rasa cinta tanah air serta melestarikan alam dan lingkungan hidup.

#### 8. P e r d a g a n g a n

Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dalam lingkup lokal, regional maupun nasional.

Dalam pada itu pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing komoditi melalui peningkatan efisiensi produksi, pemasaran, peningkatan mutu, lingkungan, sarana dan prasarana pefdagangan serta pembinaan usaha kecil, tradisional dan informal.

#### 9. K o p e r a s i

Pembangunan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus semakin dikembangkan dan diperkuat khususnya dalam bidang usaha, organisasi dan manajemen dalam rangka menumbuhkan Demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi tercapainya masyarakat yang berkeadilan sosial.

Di samping itu juga diarahkan untuk mengembangkan peranan koperasi sebagai Lembaga Ekonomi yang berwatak sosial, dengan lebih meningkatkan koperasi agar berperan lebih besar diberbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, angkutan, kelistrikan dan pariwisata serta meningkatkan kemampuan dan peranan koperasi fungsional, seperti Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pemuda agar tumbuh semakin kuat dan mandiri.

#### 10. Dunia Usaha Nasional

Pembangunan Dunia Usaha Nasional di Daerah diarahkan untuk menunjang dan melengkapi usaha pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan dunia usaha nasional. Melalui usaha penciptaan iklim usaha yang sehat dan mendorong serta merangsang pertumbuhan dunia usaha nasional baik usaha swasta, usaha pemerintah maupun koperasi dilakukan dalam rangka perluasan

kesempatan kerja .....

kesempatan kerja, peningkatan ekspor dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang tersedia. Jenis-jenis usaha kecil, tradisional dan informal yang tidak saja besar dalam jumlah tetapi juga dalam keterbatasannya, perlu ditingkatkan pula usaha bersama melalui koperasi agar lebih mampu dalam kesendiriannya.

#### 11. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenaga kerjaan diarahkan untuk meningkatkan harkat martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri memperluas dan meratakan kesempatan kerja, meningkatkan mutu dan kemampuan serta perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat menyeluruh baik dalam pembangunan sektoral maupun regional.

#### 12. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mengurangi pertumbuhan dan tekanan penduduk dan penempatan tenaga kerja dengan memperhatikan keseimbangan penyediaan tenaga kerja di daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 13. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota

Pemerataan pembangunan di daerah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan keserasian antara daerah perkotaan dengan pedesaan dan antara berbagai daerah yang mempunyai potensi yang berbeda-beda.

Pembangunan tersebut diarahkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang sangat mendesak antara lain perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pedesaan dan perkotaan guna mewujudkan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah (SERASI). Disamping itu juga untuk meningkatkan kemampuan penduduk agar dapat memanfaatkan sumber-sumber alam melalui pendekatan pengembangan wilayah dengan memperhatikan pengaturan penggunaan tanah, pengaturan kegiatan antar daerah,

keseimbangan daerah .....

keseimbangan daerah pedesaan dan perkotaan serta pengaturan Daerah Aliran Sungai. Dalam hubungan ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan pengembangan wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Khususnya wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan serta kualitas hidup bagi golongan penduduk pedesaan yang miskin, potensial, produktif dengan peningkatan potensi kota kecamatan dan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan dan guna mendorong pertumbuhan desa-desa sekitarnya.

#### 14. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk melestarikan fungsi-fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam suatu keseimbangan yang dinamis agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat baik bagi masa kini maupun generasi mendatang. Untuk itu perlu dikembangkan kebijaksanaan tata guna air yang ditujukan pada penyediaan air yang cukup, bersih dan berkesinambungan, pelestarian lingkungan alam, pencegahan banjir dan kekeringan, pencegahan kemrosotan mutu air dan kelestarian air dalam suatu Daerah Aliran Sungai.

Disamping itu dikembangkan pula kesadaran lingkungan dengan mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup serta akan tetap diupayakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu dengan jalan mengintegrasikan dimensi lingkungan kedalam program-program pembangunan.

### **AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL DAN BUDAYA**

#### 1. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

- a. Pembangunan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan selaras dengan penghayatan dan

pengamalan Pancasila .....

pengamalan Pancasila menuju terbentuknya manusia-manusia pembangunan yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhadap negara, bangsa dan tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta keserasian antara pembangunan fisik material dan mental spiritual.

- b. Pembangunan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akan terus dikembangkan dengan menciptakan iklim yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina hidup rukun diantara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal dan keikutsertaannya dalam pembangunan daerah.
- c. Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :
  - agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru ;
  - untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

## 2. P e n d i d i k a n

- a. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yaitu berwujudan manusia Indonesia yang berimam dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur berkepribadian, berdisiplin bekerja keras, berdisiplin, tangguh, bertanggung jawab, mandiri cerdas dan trampil serta sehat jasmani rohani. Pendidikan Nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri

serta sikap .....

serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif.

Dengan demikian Pendidikan Nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

- b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- c. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk :
  - 1). Meningkatkan mutu pendidikan dan peluasan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang berkualitas.
  - 2). Melanjutkan meningkatkan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan, memupuk dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945, kepada Generasi Muda disemua jenis dan jenjang pendidikan formal dari TK s/d PT baik Negeri maupun Swasta, non formal maupun dimasyarakat.
  - 3). Memperluas kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh ketrampilan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, penyandang cacad atau bertempat tinggal di daerah terpencil.  
Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya.
  - 4). Meningkatkan dan memperluas pendidikan luar sekolah/non formal yang bersifat kemasyarakatan, seperti kepramukaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini diperlukan partisipasi lembaga-

lembaga swadaya.....

lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat atau lainnya.

- 5). Meningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah.
- 6). Meningkatkan dan mendayagunakan prasarana dan sarana pendidikan disemua jenjang pendidikan formal dan pendidikan masyarakat/non formal.
- 7). Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat dalam rangka pemupukan watak, meningkatkan disiplin dan sportifitas serta pengembangan prestasi olahraga dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 8). Meningkatkan mutu, kemampuan dan ketrampilan aparat pemerintah, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang semakin meningkat.

### 3. K e b u d a y a a n

- a. Kebudayaan daerah sebagai salah satu identitas daerah yang merupakan bagian dan sekaligus sebagai penunjang kebudayaan Nasional adalah modal dasar dalam pembangunan daerah.
- b. Pembangunan kebudayaan daerah diusahakan melalui penggalian pemeliharaan, pemupukan kebudayaan daerah dan diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan segala kehidupan baik bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik guna :
  - 1). Meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal dan memantapkan rasa harga diri dan kebangsaan Nasional, memperoleh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa dimasa depan.
  - 2). Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur menyerap nilai-nilai dari luar yang positif bagi pembangunan daerah dan menangkal nilai-nilai budaya dari luar yang negatif.

3). Menciptakan .....

- 3). Menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan seperti sikap mandiri dalam kebersamaan, tenggang rasa, musyawarah dan mufakat berwawasan masa depan, kerja keras, jujur dan kesatria, hemat, cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu serta penuh pengabdian.
- 4). Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan kemasyarakatan bahasa Indonesia serta penggunaannya secara baik dan benar.
- 5). Membina, melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah dalam rangka mengembangkan dan memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa.  
Bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakat yang mendukung kebinekaan budaya sebagai unsur kreatifitas dan sumber kekuatan bangsa.
- 6). Mengembangkan kesenian daerah sebagai ungkapan budaya sehingga mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, meningkatkan apresiasi seni masyarakat, memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati seni budaya daerah serta membangkitkan semangat dan gairah membangun.
- 7). Meningkatkan pemeliharaan dan pembinaan tradisi dan peninggalan sejarah untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunann daerah dan bangsa.
- 8). Meningkatkan usaha-usaha pembauran bangsa disegala bidang kehidupan baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 4. Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian.

Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk lebih menunjang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil-hasil pembangunan di daerah dan membantu memecahkan masalah-masalah pokok yang di-

hadapi. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan lembaga dan koordinasi antara lembaga, pengembangan jaringan informasi ilmiah termasuk kestatistikan dan penggunaan jasa komputer, komunikasi hasil-hasil penelitian serta peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, untuk dapat menunjang perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

## 5. Kesehatan

- a. Pembangunan kesehatan sebagai upaya mempertinggi kualitas hidup manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, gizi masyarakat dan peningkatan kesehatan lingkungan dengan mendorong makin meningkatnya peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
- b. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik dipedesaan maupun dipertkotaan, dengan meningkatkan, memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dan dengan selalu memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan: Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan terutama melalui upaya peninggakatan dan pencegahan yang dilakukan secara serasi dan seimbang dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga serta pencegahan penyakit disamping penyuluhan kesehatan serta didukung dengan upaya pengendalian, pengawasan obat, makanan dan bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, kemampuan manajemen dengan sistem informasi yang mantap serta upaya pengembangan dan pembinaan hukum dibidang kesehatan.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan secara lebih luas dan merata sekaligus memelihara dan mengembangkan warisan budaya mengenai cara pengobatan tradisional dengan penggalan, penelitian, pengujian, pengembangan mutu obat-obatan disamping perlu terus didorong langkah-langkah pengembangan budidaya tanaman obat-obatan tradisional yang secara media dapat dipertanggung jawabkan.

## 6. Kependudukan .....

## 6. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kebijaksanaan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pengendalian pertumbuhan dan penyebaran penduduk dalam rangka peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ibu dan anak agar dapat terwujud keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera.

## 7. Perumahan dan Pemukiman

Pembangunan perumahan diarahkan untuk meingkatkan jumlah dan mutu dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat golongan yang berpenghasilan rendah serta sesuai dengan tata ruang dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Untuk itu perlu diciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan usaha perbaikan lingkungan pemukiman di daerah perkotaan dan pemugaran perumahan dan lingkungan di pedesaan, untuk mewujudkan Kabupaten Semarang Serasi.

Disamping itu perlu ditingkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

## 8. Kesejahteraan Sosial.

- a. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai salah satu upaya menuju tercapainya keadilan sosial diarahkan untuk menciptakan suasana dan kondisi sosial yang dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban dan ketentraman lahir batin serta memiliki harga diri dan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri.
- b. Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan agar tercipta sistem nilai dan sikap sosial yang mendukung usaha-usaha pembangunan sehingga terwujud kualitas hidup, partisipasi sosial, disiplin sosial dan lingkungan hidup sosial yang menunjang pembangunan sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan taraf kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat.

Dalam pembangunan .....

Dalam Pembangunan bidang kesejahteraan diutamakan fungsi pencegahan dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial, disamping fungsi rehabilitasi dan fungsi penunjang.

- c. Peningkatan usaha-usaha pelayanan sosial dilanjutkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran, tanggung jawab serta kemampuan setiap penduduk untuk ikut serta dalam pembangunan memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan menggalakkan potensi perseorangan maupun organisasi sosial.

#### 9. Generasi Muda.

- a. Pembinaan dan pengembangan generasi muda, sebagai sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan daerah dan nasional serta sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, perlu ditingkatkan terus dan diarahkan untuk menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.
- b. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilaksanakan sedini mungkin mulai tahap-tahap pertumbuhan sebagai anak, remaja dan pemuda.
- c. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menjadi tanggung jawab bersama diantara orang tua, keluarga, masyarakat lingkungan pemuda dan pemerintah.
- d. Pembinaan dan pengembangan generasi muda ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya utama dalam pembangunan.
- e. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diusahakan antara lain melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa, bernegara, mempertebal idealisme, patriotisme dan harga diri, memperluas wawasan kemasa depan, memperkokoh

kepribadian dan.....

kepribadian dan berdisiplin, mempertinggi budi pekerti, memupuk kesadaran jasmani dan daya kreasi, mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, ketrampilan, semangat kerja keras dan kepeloporan serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pembangunan Daerah dan Nasional.

- f. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk membentuk pemuda yang mampu menjadi kader yang tangguh serta memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh dan dapat membantu usaha mengatasi berbagai tantangan dan masalah pembangunan, seperti masalah tenaga kerja dan pendidikan.
- g. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan rasa tanggung jawab mereka terhadap pembangunan Daerah dan nasional serta masa depan bangsa.
- h. Pendidikan politik dalam rangka lebih memantapkan perwujudan Pancasila sebagai satu satunya azas dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara makin ditingkatkan guna mempertebal kesadaran pemuda sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negaranya.
- i. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap tantangan pembangunan masa depan sehingga akan meningkatkan kegiatan kepemudaan yang berdaya guna dan berhasil guna.

#### 10. Peranan Wanita.

Sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani bagi pembangunan wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Oleh karena itu kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan sumbangannya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.

Peranan wanita dalam pembangunan dikembangkan selaras dan serasi

dengan perkembangan.....

dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk pengembangan generasi muda terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam rangka mendorong peran serta wanita dalam pembangunan perlu makin ditingkatkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggeraknya.

## POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

### 1. P o l i t i k

Dalam usaha untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan untuk menantapkan stabilitas politik yang dinamis di daerah maka pembangungan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, sehingga perlu makin diperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum.

Sehubungan dengan itu dan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik perlu lebih didorong dan dikembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa.

### 2. Aparatur Pemerintah.

Dalam usaha untuk meningkatkan pengabdian dan kesetiaan Aparatur Pemerintah kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangungan Aparatur Pemerintah diarahkan untuk menciptakan Aparatur Pemerintah yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya yang dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat.

### 3. H u k u m.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan,  
kebenaran dan .....

kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pelayanan dan kepastian hukum.

Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberikan dukungan dan pengarahannya kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin Nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.

Disamping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tentram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas di daerah.

#### 4. Penerangan dan Media Massa.

Pembangunan dan penerangan media masa harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila.

Sebagai wahana informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah, penerangan diarahkan untuk menggerakkan pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh kesatuan dan persatuan Nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, memantapkan nilai-nilai budaya bangsa untuk mempertebal kepribadian Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan komunikasi sosial serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan bangsa harus dapat membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran seluruh rakyat dalam berbangsa dan bernegara.

## KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pembangunan .....

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat diarahkan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dalam rangka mendukung kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan mengamankan hasil-hasilnya serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat terhadap masyarakat berbagai bencana yang timbul. Dalam usaha pembelaan negara perlu ditumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam rangka mendukung perwujudan daya tangkal yang tangguh terhadap berbagai gangguan dan ancaman.

### ARAH KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH (SPATIAL)

Dalam rangka penjabaran arah kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam arah pembangunan jangka panjang serta untuk lebih mengetahui hakekat pembangunan daerah agar segala permasalahan yang ada dapat dipahami dan dipecahkan segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan lingkungan, diperlukan arah kebijaksanaan tata ruang daerah sebagai berikut :

#### 1. Pembangunan Desa dan Kota.

Kebijaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan di wilayah pedesaan di dalam jaringang wilayah yang lebih luas dan perlu diwujudkan melalui pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan pengembangan dengan daerah perkotaan.

Sedangkan kebijaksanaan pembangunan daerah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diarahkan pada pertumbuhan kota sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan Pendekatan tata ruang pedesaan dan perkotaan ini memadukan langkah kebijaksanaan serta kegiatan-kegiatan antara kota dan desa sebagai wilayah pendukung secara timbal balik dengan menempatkan masing-masing wilayah sebagai unsur yang saling melengkapi agar laju pertumbuhan wilayah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang lebih seimbang serta profesional. Keterkaitan kebijaksanaan desa dan kota di harapkan

akan lebih.....

akan lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja kesejahteraan masyarakat di pedesaan dengan meningkatnya produktifitas wilayah yang berkelanjutan.

## 2. Sub Wilayah Pembangunan ( S W P )

Dengan memperhatikan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang terdiri dari wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, masing-masing mempunyai fungsi dan wilayah bagian yang tak terpisahkan dalam suatu sistem pengembangan wilayah.

Predikat "Sub" dalam mekanisme pengembangan menyatakan berlakunya suatu hirarki dalam fungsi-fungsi pengembangan, yang menggambarkan kedudukan dan kontribusi masing-masing bagian wilayah dalam proses perkembangan. Struktur ini bertumpu pada struktur dasar yang terbentuk oleh kaidah-kaidah yang berlaku dalam kegiatan usaha manusia yang pada prinsipnya dilandasi pencapaian efisiensi yang sebesar-besarnya dalam hal ini kegiatan usaha mendistribusikan barang-barang primer dari sumber alam sampai konsumen akhir, dengan melalui jangkauan kemudahan yang setinggi-tingginya dan pemasaran yang seluas-luasnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan mempertimbangkan pula kebijaksanaan penentuan wilayah pembangunan sebelumnya serta berdasarkan pengamatan potensi pertumbuhan saat ini, maka untuk masa yang akan datang diambil kebijaksanaan dengan menentukan 4 ( empat ) sub wilayah Pembangunan yaitu :

### a. Sub Wilayah Pembangunan I :

1. Kebijakanaksanaan : Daerah pengembangan Pemerintahan, perdagangan dan Daerah Konservasi air dan tanah.
2. Pusat Pengembangan : Kota Ungaran
3. Daerah Cakupan : Kecamatan Ungaran
4. Masalah pokok yang dihadapi.
  - Kondisi jalur arteri primer yang sudah tidak memadai akibat terlalu tingginya arus lalu lintas.
  - Penyediaan fasilitas kota, dalam hubungannya kota Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang dan .....

Semarang dan Kota Ungaran sebagai penyangga Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

5. Potensi Utama

- Letak kota Ungaran yang relatif dekat dengan kota Semarang.

- Kota Ungaran yang berudara sejuk dan mempunyai pemandangan indah.

- Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mempunyai kandungan sumber air yang cukup besar.

- Ungaran sebagai daerah penyangga kota Semarang.

6. Sektor strategis yang perlu dikembangkan adalah sektor perdagangan.

b. Sub Wilayah Pembangunan II :

1. Kebijakanaksanaan : Daerah pengembangan Industri bagian Timur jalan Raya Semarang-Surakarta sedangkan di sebelah Barat jalan adalah Daerah Konservasi Air dan Tanah.

2. Pusat Pengembangan : Desa Ngempon

3. Daerah Cakupan : Kecamatan Klepu dan Kecamatan Bawen.

4. Masalah pokok yang dihadapi

- Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah.

- Topografi berbukit-bukit.

- Air bersih cukup sulit.

- Keadaan tanah relatif kurang subur.

5. Potensi Utama

- Tenaga kerja cukup murah.

- Letaknya yang relatif dekat dengan kota Semarang sehingga ongkos transport hasil produksi ke daerah pemasaran cukup murah.

- Hubungan lalu .....

- Hubungan lalu lintas dari tempat bahan baku ke pusat produksi dan dari pusat produksi ke daerah pemasaran cukup baik dan lancar.

6. Sektor strategis yang perlu dikembangkan :

Industri non polusi yang menyerap banyak tenaga kerja.

- Peningkatan ketrampilan tenaga kerja.
- Penyediaan fasilitas penunjang/sarana dan prasarana.
- Peningkatan penghijauan lingkungan untuk konservasi air dan tanah.

c. Sub Wilayah Pembangunan III

1. Kebijakanaksanaan : Daerah pengembangan Pariwisata.
2. Pusat pengembangan : Kota Ambarawa.
3. Daerah Cakupan : Kecamatan Ambarawa, Sumowono, Jambu, Banyubiro, Getasan dan Tuntang.
4. Masalah pokok yang dihadapi
  - Kurangnya ketrampilan masyarakat.
  - Sarana dan prasarana wisata yang belum memadai.
  - Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat di sekitar obyek wisata yang kurang menunjang.
5. Potensi Utama
  - Terdapat beberapa obyek wisata yang cukup potensial.
  - Obyek wisata yang terletak di pegunungan yang sejuk dan nyaman.
  - Terdapat Rawa Pening yang dapat dikembangkan lebih besar lagi bagi kebutuhan rekreasi/pariwisata.
  - Keadaan alam yang sangat mendukung.
6. Sektor strategi yang perlu dikembangkan.
  - Kegiatan pertanian yang mendukung pariwisata.
  - Industri kerajinan rakyat.
  - Peningkatan kondisi lingkungan pemukiman di sekitar obyek wisata.
  - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat diberbagai bidang dan sektor pariwisata.

d. Sub Wilayah.....

d. Sub Wilayah Pembangunan IV

1. Kebijakan : Daerah Pengembangan Pertanian.
2. Pusat Pengembangan : Kota Suruh.
3. Daerah Cakupan : Kecamatan Suruh, Tenganan, Susukan, Salatiga LK dan Bringin.
4. Masalah pokok yang dihadapi
  - Tingkat pendidikan masyarakat relatif masih rendah.
  - Kurangnya pendayagunaan tanaman perkebunan rakyat.
  - Mutu industri kerajinan rakyat yang masih perlu ditingkatkan.
5. Potensi Utama
  - Daerah pengembangan tanaman keras.
  - Daerah potensi untuk pengembangan peternakan.
  - Kondisi alam yang cocok untuk pengembangan pertanian.
  - Industri kerajinan rakyat.
6. Sektor strategis yang perlu dikembangkan
  - Peningkatan pendayagunaan tanaman perkebunan rakyat.
  - Peningkatan pengembangan peternakan.
  - Peningkatan mutu industri kerajinan rakyat.
  - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat diberbagai bidang dan sektor pertanian.
  - Pengembangan pertanian lahan kering.

3. Daerah Aliran Sungai ( DAS )

Dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan secara optimal serta mempertahankan fungsi-fungsi sumber alam berupa hutan, tanah dan air sekaligus merehabilitasi yang rusak serta meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor lain, sekaligus merehabilitasi yang rusak, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ditentukan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai berikut :

1. Sub Daerah Aliran Sungai Kaligarang.
2. Daerah Aliran Sungai Jratunseluna, yang terdiri dari beberapa Sub DAS dan Sub - Sub DAS sebagai berikut :
  - a. Sub DAS Jragung meliputi : Kecamatan Ungaran, Klepu dan Bawen.

b. Sub DAS .....

- b. Sub DAS Tuntang meliputi : Kecamatan - kecamatan Salatiga LK, Bringin, Suruh, Jambu dan Banyubiru yang terdiri dari Sub-Sub DAS Bancak dan Rawa Pening.
- c. Sub DAS Serang meliputi : Kecamatan - kecamatan Tenganan, Susukan, Getasan dan Suruh yang terdiri dari Sub-Sub DAS Gading.

Kebijaksanaan Tata Ruang sebagai tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan pertumbuhan dan pemerataan tingkat pelayanan dengan mengusahakan penggunaan tanah secara lestari, optimal dan seimbang serta mengusahakan keserasian pembangunan sehingga dicapai daya guna dan hasil guna yang setinggi tingginya.

#### **D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Sesuai Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, maka dalam Pelita V Daerah prioritas Pembangunan Daerah diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi yang mengarah pada peningkatan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan.  
Usaha-usaha pokok yang dilakukan dalam bidang ini ditujukan untuk:
  - a. Pemenuhan kebutuhan primer yaitu pangan dengan memantapkan dan melestarikan swasembada pangan dan pemenuhan kebutuhan primer lainnya seperti sandang dan papan.
  - b. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
  - c. Peningkatan komoditi non migas.
  - d. Peningkatan peranan dunia usaha nasional, swasta dan koperasi dalam pengembangan ekonomi di daerah.
  - e. Peningkatan pembinaan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama industri kecil dan kerajinan rakyat serta industri pariwisata.
  - f. Peningkatan dan penyesuaian pembangunan daerah pedesaan dan perkotaan melalui pengembangan swadaya masyarakat dan pengaturan tata ruang daerah.
  - g. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
  - h. Pemeliharaan .....

- h. Pemeliharaan dan peningkatan tersedianya prasarana dan sarana ekonomi.
2. Sejalan dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi, maka pembangunan bidang-bidang di luar bidang ekonomi, makin ditingkatkan sepadan agar saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya arti yang seluas-luasnya, termasuk meningkatkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.
- Usaha-usaha yang akan dilakukan dalam bidang ini ditunjukkan untuk :
- a. Peningkatan dan perluasan pemasyarakatan P4
  - b. Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, termasuk tindak lanjut bebas tiga buta dan pemantapan pelaksanaan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar.
  - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  - d. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana dan transmigrasi.
  - e. Peningkatan pembinaan generasi muda, peranan wanita dan kesejahteraan sosial.
  - f. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
  - g. Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah termasuk pembinaan disiplin.
  - h. Peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat termasuk swasta.
  - i. Peningkatan kemampuan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - j. Peningkatan dan pembinaan administrasi dan desentralisasi.
  - k. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana non ekonomi

Dalam melakukan usaha-usaha pokok tersebut perlu lebih memperhatikan daerah-daerah khusus yang mempunyai potensi berbeda-beda dalam rangka untuk menyerasikan pertumbuhan antara daerah.

#### **E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka menunjang, menerapkan dan melengkapi pembangunan

Nasional .....

Nasional dan dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi serta masalah-masalah yang dihadapi, maka sasaran-sasaran pembangunan masing-masing sektor dalam Repelita Kelima di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah sebagai berikut :

## E K O N O M I

1. Pertanian
  - a. Meningkatkan mutu, produksi dan pemasaran hasil pertanian.
  - b. Kelestarian produksi dan sumber hayati pertanian.
  - c. Berkembangnya usaha tani terpadu.
2. Pengairan
  - a. Meningkatkan mutu, jumlah serta fungsi sarana dan prasarana pengairan.
  - b. Meningkatkan peran serta dan prakarsa kelompok tani pemakai air ( Dharma Tirta ).
3. Industri.
  - a. Meningkatkan mutu, produksi dan pemasaran hasil produksi industri.
  - b. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada bidang industri.
  - c. Meningkatkan pendapatan pengusaha dan pengrajin.
  - d. Terbinanya kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan hidup.
  - e. Berkembangnya industri yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian.
4. Pertambangan
  - a. Meningkatkan investasi identifikasi dan penelitian berbagai sumber bahan tambang dan galian.
  - b. Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi berbagai bahan tambang dan galian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
  - c. Meningkatkan investasi dan partisipasi dunia usaha nasional.
  - d. Meningkatkan daya guna air bawah tanah untuk berbagai keperluan.
  - e. Terbinanya kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan hidup.
5. Energi .....

5. E n e r g i

- a. Meningkatnya kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.
- b. Meningkatnya perluasan jaringan transmisi dan distribusi.
- c. Meningkatnya usaha diversifikasi energi dengan pengembangan potensi energi lain yang tersedia setempat dan hemat biaya serta memanfaatkan teknologi tepat guna.

6. P e r h u b u n g a n

- a. Meningkatnya mutu, jumlah serta fungsi sarana dan prasarana perhubungan.
- b. Meningkatnya kemampuan organisasi dalam kegiatan pelayanan jasa perhubungan.

7. P a r i w i s a t a

- a. Meningkatnya mutu, jumlah serta fungsi sarana dan prasarana kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor lain.
- b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan.
- c. Pendayagunaan asset wisata yang potensial.

8. P e r d a g a n g a n

- a. Meningkatnya efisiensi pemasaran, penyediaan, penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana perdagangan serta perluasan kesempatan kerja.
- b. Berkembangnya aneka ragam komoditi andalan Kabupaten Semarang dan upaya daya saing terhadap komoditi luar negeri serta meningkatnya semangat penggunaan produksi dalam negeri.
- c. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan terhadap pedagang golongan ekonomi lemah.

9. K o p e r a s i

- a. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perkoperasian serta pengembangan kerja sama antara koperasi dengan usaha niaga lainnya.
- b. Meningkatnya bimbingan dan pembinaan bidang usaha dan kelembaga koperasi di berbagai sektor produktif.

10. Dunia .....

10. Dunia Usaha Nasional

- a. Meningkatkan iklim usaha yang merangsang tumbuh berkembangnya dunia usaha nasional baik swasta, negara maupun koperasi.
- b. Meningkatnya kerja sama antar dunia usaha nasional baik swasta, negara maupun koperasi dan antar dunia usaha nasional dengan pemerintah.
- c. Meningkatnya penanaman modal oleh masyarakat terutama penanaman modal dalam negeri.
- d. Meningkatnya kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewiraswastaan para pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal.

11. Tenaga Kerja.

- a. Berkembangnya pola perencanaan ketenagakerjaan di daerah secara terpadu dan menyeluruh dalam rangka menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya diberbagai lapangan kerja.
- b. Semakin sempurnanya sistem informasi pasar kerja, sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di dalam rangka penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik, terutama bagi angkatan kerja usia muda melalui mekanisme yang tepat.
- c. Meningkatnya pembinaan dan pelaksanaan hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam rangka menciptakan kesamaan pengertian mengenai hak dan kewajiban masing-masing, peningkatan pertumbuhan dan perkembangan serikat kerja serta peningkatan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja.
- d. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja untuk mengembangkan kewiraswastaan dan penyediaan tenaga trampil.
- e. Meningkatnya kegiatan padat karya baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan guna menyalurkan tenaga pengangguran dan setengah pengangguran.
- f. Meningkatnya kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

12. T r a n s m i g r a s i

- a. Meningkatnya .....

- a. Meningkatkan kemantapan penyelenggaraan Transmigrasi melalui penelitian, koordinasi perancangan antar instansi yang terkait, kerjasama antara daerah pengirim dan penerima serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi
  - b. Meningkatkan jumlah dan mutu transmigrasi yang akan diberangkatkan ke daerah transmigrasi dengan peningkatan ketrampilan para calon transmigran sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan di daerah transmigrasi.
  - c. Meningkatkan penerangan dan penyuluhan transmigrasi dalam rangka menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi, dengan lebih mendorong transmigrasi swakarsa.
  - d. Tersedianya bantuan sarana produksi dan sarana sosial budaya bagi transmigran.
13. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.
- a. Meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah (regional) melalui penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud dapat memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah serta dapat memanfaatkan potensi/ sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah secara optimal guna pengembangan lebih lanjut dan terwujudnya Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah (SERASI).
  - b. Meningkatkan koordinasi fungsional perwilayahan dan kerja sama pembangunan antar daerah untuk lebih melancarkan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
  - c. Meningkatkan kelancaran perhubungan di satu daerah maupun antar daerah dalam usaha pencapaian keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan masing-masing daerah, khususnya peningkatan perhatian terhadap pembangunan daerah-daerah yang kurang berkembang dan berpenduduk padat.
  - d. Meningkatkan administrasi dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.
  - e. Meningkatkan .....

- e. Meningkatnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kesadaran serta kemampuan penduduk dalam usaha pemanfaatan serta pemeliharaan kelestarian berbagai sumber alam serta membina dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman.
  - f. Meningkatnya usaha pemanfaatan tanah sesuai dengan kemampuan daya dukungnya meliputi penataan penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah untuk kesejahteraan masyarakat.
  - g. Meningkatnya pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta pemanfaatan secara maksimal dana - dana yang langsung maupun diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Termasuk dalam hal ini meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan dengan sasaran meningkatnya pendapatan golongan berpenghasilan rendah, potensial dan produktif melalui kegiatan produksi, pendidikan latihan ketrampilan, perkreditan serta pengembangan kelembagaan di daerah pedesaan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan kebudayaan menuju desa swasembada.
  - h. Meningkatnya pembangunan perkotaan secara berencana dengan usaha peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, pengaturan penggunaan ruang untuk kegiatan dan fasilitas dengan pengaturan tata guna tanahnya serta meningkatkan usaha reservasi dan konservasinya. Perhatian secara lebih khusus diarahkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan jasa wilayah, pusat pusat pertumbuhan sekunder serta pusat-pusat wilayah yang terisolir.
14. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- a. Meningkatnya kegiatan pengkajian, pemanfaatan, pengendalian dan pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.
  - b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk ikut serta melestarikan sumber alam dan lingkungan hidup.

## AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA

### 1. Agama dan .....

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. A g a m a

- 1) Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan pendidikan agama di sekolah umum mulai dari Taman Kanak Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- 3) Meningkatkan prasarana dan sarana bimbingan, penyuluhan dan penerangan agama.
- 4) Meningkatkan dan berkembangnya seni budaya yang bernafaskan keagamaan.
- 5) Meningkatkan usaha-usaha pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah bagi umat beragama.
- 6) Meningkatkan kerukunan intern dan antara umat beragama dan dengan pemerintah.
- 7) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

b. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.

Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :

- 1) Terlaksananya pembinaan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- 2) Tercapainya pembinaan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. P e n d i d i k a n

- a. Meningkatkan mutu pendidikan formal maupun non formal.
- b. Meningkatkan daya tampung pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah pertama.
- c. Meningkatkan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan/penyebarluasan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pendidikan, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat memupuk, mengembangkan dan meneruskan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan, khususnya nilai nilai 45, baik melalui pendidikan formal, non formal maupun di masyarakat.

- d. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan masyarakat terutama tindak lanjut dari Tuntasan Bebas Tiga Buta, kepramukaan serta berbagai ketrampilan, kejuruan, keahlian, kemahiran praktis untuk dapat memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan.
- e. Meningkatnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya khususnya di bidang pendidikan masyarakat.
- f. Meningkatnya partisipasi dan pengabdian perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam kegiatan - kegiatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan di daerah pedesaan.
- g. Meluasnya kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh ketrampilan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, menyandang cacat atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
- h. Meningkatnya pembinaan kepada anak-anak berbakat istimewa untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuan.
- i. Meningkatnya pembinaan dan pengajaran bahasa Jawa sebagai salah satu muatan lokal sekaligus menunjang pengembangan bahasa Indonesia.
- j. Meningkatnya pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik pendidikan formal, baik pendidikan formal maupun non formal.
- k. Meningkatnya pelaksanaan sistem pendidikan dan pengembangan berbagai jenis, kemampuan, keahlian dan ketrampilan untuk meningkatkan produktifitas, kreatifitas, mutu dan efisiensi kerja bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan.
- l. Meningkatnya pendidikan kedinasan untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah yang produktif, kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- m. Meningkatnya kerja sama untuk lebih memantapkan peranan pengabdian dan tanggung jawab Perguruan Tinggi dalam menunjang Pembangunan Daerah.
- n. Meningkatnya pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, sehingga menjangkau semua lembaga pendidikan dan masyarakat luas di seluruh daerah.
- o. Meningkatnya pembinaan dan pendidikan tenaga kependidikan serta pembinaan kesejahteraannya.
- p. Meningkatnya pendidikan jasmani dan olah raga di lingkungan sekolah dan masyarakat serta di lingkungan kedinasan dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat.
- q. Meningkatkan prestasi berbagai cabang olah raga dalam rangka meningkatkan prestasi dan prestise Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang di Tingkat Jawa Tengah dan Nasional.

### 3. Kebudayaan.

- a. Meningkatkan pembinaan Bahasa Indonesia serta penggunaannya secara tepat, baik dan benar di lingkungan pendidikan formal, non formal dan Dinas/Instansi, serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya.
- b. Meningkatnya pengkajian dan pembinaan bahasa daerah sebagai bahasa warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan.
- c. Terbinanya dan berkembangnya kesenian daerah, lestarnya kesenian tradisional serta meningkatnya aspirasi dan kreatifitas seni.
- d. Tersedianya prasarana dan sarana pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk membina dan melastarikan kesenian daerah.
- f. meningkatnya dan berkembangnya permuseuman sebagai tempat untuk menampung, memelihara, melestarikan, menikmati, menghargai dan mendayagunakan peninggalan kebudayaan nenek moyang dan sekaligus sebagai tempat rekreasi dan studi tentang kebesaran dan keagungan bangsa di masa lampau.
- g. Meningkatnya pelestarian dan pendayagunaan peninggalan sejarah dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- h. Meningkatnya minat, kebiasaan dan kegemaran membaca di lingkungan masyarakat.
- i. Terselenggaranya investarisasi dan dokumentasi sejarah dan nilai - nilai tradisional serta kebudayaan daerah.
- j. Meningkatnya usaha-usaha pembauran bangsa di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mantapnya ketahanan Nasional.

### 4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

- a. Meningkatnya kegiatan penelitian, khususnya penelitian yang dalam waktu singkat dapat membantu memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi dan belum sepenuhnya diselesaikan dalam Pelita yang lalu, seperti kependudukan, keseimbangan dan pelestarian alam, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, aparatur pemerintah, serta laju pertumbuhan daerah.
- b. Meningkatnya kemampuan Lembaga-lembaga Penelitian, Organisasi-organisasi Profesi serta koordinasi antara lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian di

di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi agar meningkatkan daya guna, hasil guna dan partisipasinya dalam menunjang pembangunan di daerah.

- c. Meningkatnya pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, baik teknologi tradisional maupun baru dapat menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatnya dan semakin sempurnanya jaringan informasi ilmiah, kestatistikan, penggunaan jasa komputer dan komunikasi hasil-hasil penelitian dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

## 5. K e s e h a t a n

- a. meningkatnya koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan dibidang kesehatan melalui kerjasama lintas sektoral disemua bidang yang berkaitan dengan kesehatan serta peran serta masyarakat disemua tingkatan.
- b. Meningkatnya penyuluhan kesehatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta membudayakan perilaku hidup sehat diseluruh lapisan masyarakat melalui pusat-pusat kesehatan masyarakat pos-pos pelayanan terpadu serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya.
- c. Meningkatkan kesehatan lingkungan ditujukan kepada mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan dengan meningkatnya penyediaan air bersih dan meningkatnya sanitasi dasar serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang dapat menimbulkan berbagai akibat sampingan terhadap kesehatan.
- d. Meningkatnya status gizi masyarakat.

e. Meningkatnya .....

- e. Meningkatnya perbaikan kesehatan rakyat melalui pencegahan pemulihan dan penyembuhan penyakit, pemberantasan penyakit menular, perlindungan rakyat terhadap penyalahgunaan obat, makanan dan minuman serta meluasnya cakupan pelayanan kesehatan dan imunisasi untuk kesejahteraan ibu dan anak, termasuk Keluarga Berencana.
- f. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu dan pengembangan pusat-pusat kesehatan masyarakat, lembaga-lembaga pemulihan kesehatan serta memperluas jangkauan rumah sakit.
- g. Bermanfaatnya dan meningkatnya mutu serta jumlah tenaga kesehatan yang ada dengan pendidikan dan latihan disamping upaya meningkatkan jumlah dan kemampuan kader yang terlatih dibidang kesehatan.

#### 6. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- a. Meningkatnya koordinasi penanganan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana secara terpadu antar Instansi dengan mengikutsertakan masyarakat.
- b. Meningkatnya penerangan dan pendidikan kependudukan pada setiap tingkat pendidikan dan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatnya administrasi kependudukan sampai pada tingkat organisasi pemerintahan yang terendah.
- d. Meningkatnya gerakan Keluarga Berencana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera yang pelaksanaannya atas dasar kesadaran dan secara suka rela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Meningkatnya jangkauan pekayanan dan terbinanya peserta Keluarga Berencana dengan mendorong peranan dan tanggung jawab masyarakat serta memelihara dan meningkatnya jumlah peserta Keluarga Berencana lestari mantap dan mandiri.

#### 7. Perumahan .....

## 7. Perumahan dan Pemukiman.

- a. Meningkatnya pembangunan perusahaan terutama yang dapat dijangkau oleh masyarakat golongan berpenghasilan rendah dengan meningkatnya kerjasama antara kegiatan swasta, pemerintah dan masyarakat.
- b. Meningkatnya pembangunan perumahan dan pemukiman secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan jumlah penduduk dan penyebarannya, tata guna tanah, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, fasilitas sosial yang dibutuhkan, produksi bahan bangunan setempat dan keserasiannya dengan lingkungan pemukiman pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.
- c. Meningkatnya perbaikan lingkungan pemukiman untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan mendorong prakarsa serta peranan masyarakat.
- d. meningkatnya peranan lembaga pembiayaan ( Perbankan ) yang melayani pembangunan perumahan sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembiayaan pembangunan perumahan dalam jumlah yang besar dan dengan harga yang terjangkau rakyat banyak.
- e. Meningkatnya produksi bahan-bahan bangunan yang murah, memenuhi syarat-syarat teknis dan kesehatan, terbuat dari bahan dalam negeri dengan penyempurnaan dan pengembangan sistem pemasaran.
- f. Meningkatnya penyuluhan mengenai teknik pembangunan perumahan serta pemugaran perumahan dan lingkungan desa untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- g. Meningkatnya penyediaan air bersih di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan disertai penyempurnaan cara pengelolaan air bersih guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## 8. Kesejahteraan Sosial.

- a. Meningkatnya .....

- a. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan upaya penanggulangan masalah sosial secara terpadu melalui kerjasama lintas sektoral dengan bidang lain yang terkait dengan disertai peningkatan peran serta masyarakat guna menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.
- b. Meningkatnya tingkat kesadaran, tanggung jawab dan kemampuan setiap penduduk dengan meningkatkan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
- c. Meluasnya jangkauan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan peranan organisasi sosial yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- d. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada penyandang cacat, fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, lanjut usia yang tidak mampu baik melalui panti maupun non panti serta korban bencana alam dan musibah lainnya.
- e. Meningkatnya usaha-usaha untuk membantu para penyandang cacat agar dapat memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan martabat bangsa dan negara.
- f. Meningkatnya pembinaan dan penyantunan cacat veteran dan pejuang kemerdekaan sesuai dengan dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara.
- g. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui perluasan jangkauan, meningkatnya mutu dan jumlah panti-panti sosial serta meningkatnya dan berkembangnya kegiatan swadaya sosial masyarakat.
- h. Meningkatnya pembinaan tenaga kesejahteraan sosial dengan menciptakan iklim yang dapat mendorong kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

## 9. Generasi Muda.

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui berbagai jalur dan wadah pembinaan generasi muda.
- b. Meningkatnya usaha-usaha penanggulangan pengaruh kebudayaan yang negatif terhadap generasi muda.
- c. Meningkatnya partisipasi, rasa memiliki dan rasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
- d. Meningkatnya pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat memberi bekal untuk siap menciptakana dan memenuhi kebutuhan berbagai lapangan kerja.
- e. Meningkatnya wadah-wadah generasi muda, antara lain Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS ), Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Perguruan Tinggi, KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Palang Merah Remaja, secara terarah dan terpadu.
- f. Meningkatnya dan tersedianya prasarana dan sarana pembinaan generasi muda antara lain dibidang olah raga, kesenian, kepariwisataan, lingkungan hidup, keagamaan dan usaha-usaha lain yang produktif.

## 10. Peranan Wanita.

- a. Meningkatnya peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan dengan meningkatnya kemampuan dengan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan diberbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Meningkatnya dan berkembangnya kegiatan wanita dalam mewujudkan, membina dan berkembangnya keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun.

c. Meningkatnya .....

- c. Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggerakannya.
- d. Meningkatkan penyelenggarakan kegiatan peranan wanita dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektoral disemua bidang yang berkaitan dengan upaya peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera.

## POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

### 1. P o l i t i k

- a. Meningkatnya dan meluasnya usaha-usaha pembudayaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) untuk lebih memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pendidikan, penataran, keteladanan serta usaha lainnya di semua lapisan masyarakat.
- b. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara danai-Partai makin mampu ikut berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Meningkatnya peran secara lebih efektif bagi organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1982.
- d. Meningkatnya kegiatan dan peranan kekuatan-kekuatan sosial politik, khususnya Partai-partai politik dan Golongan Karya dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuannya untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuannya untuk berperan dalam kehidupan

politik .....

baik dalam melaksanakan pendidikan politik maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan. Disamping itu perlu dikembangkan iklim sehat bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam masing-masing organisasi sosial politik maupun dilingkungan masyarakat luas.

- e. Meningkatnya kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat, untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya dan bagi kekuatan sosial politik untuk menampung serta menyalurkannya, sehingga berkembang komunikasi politik timbal balik antara masyarakat serta antara masyarakat dengan lembaga perwakilan. Rakyat dan dengan pemerintah Untuk itu perlu dipelihara dan ditingkatkan sikap keterbukaan sebagai pendukung terselenggaranya komunikasi tersebut.
- f. Meningkatnya peranan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, fungsi serta agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana bagi masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
- g. Mantapnya fungsi dan meningkatnya peranan wadah wadah penyalur pendapat masyarakat terutama di pedesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pembangunan, termasuk pembina iklim dan peluang kepada generasi muda untuk lebih berperan di masa depan.

## 2. Aparatur Pemerintah.

- a. Meningkatnya pembinaan, penyempurnaan dan pendaan gunaan Aparatur Pemerintah di daerah yang mencakup segi organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan personil serta sarana dan prasarana kerja, termasuk perusahaan-perusahaan milik daerah selaku aparatur perekonomian daerah, perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian dan keteladanannya. Sejalan dengan itu Aparatur Pemerintah harus makin mampu melayani, mengayomi serta

menumbuhkan .....

menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

- b. Semakin tertibnya Aparatur Pemerintah terutama dalam menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak kewibawaan Aparatur Pemerintah. Untuk itu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya perlu ditingkatkan secara lebih terpadu.
- c. Meningkatnya hubungan fungsional antar legislatif dan eksekutif peningkatan koordinasi dan kerja sama Aparatur Pemerintah Pusat maupun Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih terencana dan terpadu.  
Dalam hal ini kemajuan pembangunan daerah perlu diupayakan dengan langkah langkah yang mengarah kepada terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
- d. Meningkatnya kemampuan Pemerintah wilayah Kecamatan agar dapat melaksanakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif serta meningkatnya kemampuan pemerintahan desa, agar makin melayani masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menyelenggarakan administrasi desa yang makin tertib berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Terlaksananya Pengawasan Melekat sehingga fungsi dan peranan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

### 3. H u k u m

- a. Meningkatnya.....

- a. Meningkatnya pembaharuan Hukum secara terarah dan terpadu serta tersusunnya perundang-undangan baru yang dapat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
  - b. Meningkatnya penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
  - c. Untuk menunjang upaya pembangunan hukum terutama dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah, diperlukan meningkatnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( SJDI Hukum ).
  - d. Semakin mantapnya kedudukan dan peranan badan badan penegak hukum perlu terus dimantapkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing terus meningkatnya kemampuan dan kewibawaan serta sikap perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.
  - e. Meningkatnya pelayanan konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang kurang mampu, agar dapat dicapai pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
  - f. Meningkatnya langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945.
4. Penerangan dan Media Masa.
- a. Meningkatnya jangkauan penerangan sampai ke pedesaan dalam

rangka pemerataan .....

rangka pemerataan informasi dengan memanfaatkan berbagai media penerangan seperti pers, radio, televisi, film, video, media komunikasi tradisional dan forum komunikasi pedesaan, dengan memperhatikan kondisi dan kebinekaan masyarakat serta kepribadian bangsa. Demikian pula perlu dilanjutkan dan ditingkatkan penyebaran koran masuk desa dan pemberitaan pembangunan untuk desa.

- b. Meningkatnya peranan pers dalam pembangunan dalam rangka pengembangan pers yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat, dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatnya kemampuan forum komunikasi pedesaan dalam pembangunan, sarana prasarana dan media massa termasuk pendidikan dan latihan agar kegiatan penerangan dan peranan media massa dapat makin berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Meningkatnya usaha-usaha penerangan dan peranan media massa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mantap di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dapat lebih menggairahkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- e. Meningkatnya usaha-usaha dalam membudayakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- f. Meningkatnya penerangan secara terpadu dan peranan media massa untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1992.

## KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Meningkatnya pembinaan pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui usaha-usaha pemantapan sistem ketentraman dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan alat negara penegak hukum dengan mengutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sehingga terbina kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta yang ampuh dengan ketahanan mental yang tangguh.

2. Meningkatnya.....

2. Meningkatnya peranan pertahanan sipil sebagai salah satu unsur pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pertahanan sipil di daerah secara guna dan berhasil guna.
3. Meningkatnya usaha-usaha kemanunggalan ABRI dan rakyat melalui operasi Bhakti ABRI, dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai kekuatan sosial politik di daerah.
4. Meningkatnya usaha-usaha untuk mengamankan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR RI tahun 1988.
5. Meningkatnya kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis dengan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap bekas G 30S/PKI serta peningkatan kewaspadaan khususnya terhadap subversi, golongan ekstrim kiri, ekstrim kanan maupun sekstrim lainnya serta bentuk-bentuk gangguan kamtibmas lainnya.

#### F. STRATEGI PEMBIAYAAN

##### 1. U m u m

Pembangunan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang bermakna menunjang dan merupakan pelengkap dari pelaksanaan Pembangunan Nasional harus berjalan serasi dan selaras dengan proses Pembangunan Nasional tersebut. Untuk itu Pembangunan Daerah harus merupakan usaha terciptanya kondisi yang memungkinkan Pembangunan Bangsa dapat berjalan lancar.

Keseimbangan pembangunan akan tetap diusahakan baik keseimbangan pembangunan antar Daerah maupun antar sektor. Keseimbangan pembangunan tersebut harus mendukung terciptanya struktur ekonomi yang kuat yang mendasarkan pada keseimbangan antara industri dan pertanian.

Disamping itu usaha pembangunan yang kita lakukan sudah barang tentu berhulu dan bermuara pada trilogi pembangunan, sehingga pembangunan tersebut benar, benar dapat mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan, dalam suasana perikehidupan bangsa yang stabil dan dinamis.

Dalam.....

Dalam rangka meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peranserta dan pengarahan dana dari Pemerintah dan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, guna mendukung pembiayaan pembangunan yang senantiasa meningkat, maka sasaran yang perlu dicapai adalah usaha pemekaran basis pendapatan Daerah, baik dengan pemungutan yang lebih intensif wajar dan tertib terhadap sumber-sumber dana yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber pendapatan yang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

perundangan yang berlaku.  
Untuk maksud tersebut maka sangat diperlukan peningkatan kemampuan dan perbaikan Aparatur Pemerintah yang menyangkut jumlah, mutu dan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan, baik aparatur pemerintah daerah maupun aparatur pemerintah pusat di daerah, guna mewujudkan azas otonomi daerah sevara lebih nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan itu maka untuk pembiayaan pembangunan di Daerah perlu disediakan dana dalam jumlah yang memadai yang penggunaannya ditujukan untuk mencapai sasaran pokok sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan pengaruh kumulatif yang berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal dan sekaligus merupakan usaha menciptakan iklim yang memungkinkan investasi-investasi swasta dapat berkembang.

## 2. Kebijakanaksanaan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan Daerah diperlukan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat keterbatasan sumber dana yang ada, maka Pemerintah Daerah menempuh kebijakanaksanaan yang sesuai dengan sifat masing-masing sumber dana, baik yang sepenuhnya dikuasai Daerah maupun yang berasal diluar kekuasaan Daerah.

Adapun sumber pembiayaan tersebut dapat dibagi sebagai berikut :

### a. Anggaran Pemerintah.

#### 1). Dalam Negeri.

a). Dari .....

a). Dari Pemerintah Pusat.

Dana ini diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, merupakan Subsidi perimbangan keuangan yang berupa berbagai jenis program dan proyek sektoral, serta untuk keperluan Belanja Pegawai dan Non Pegawai.

b). Dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dana dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I ini juga berupa program dan proyek-proyek yang dialokasikan di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, baik yang menjadi tanggung jawab Bupati Kepala Daerah, maupun menjadi tanggung jawab Dinas / Instansi Tingkat I.

Kedua sumber tersebut diatas merupakan sumber dana yang diluar penguasaan daerah.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka mengefektifkan penggunaan dana tersebut diarahkan untuk :

- (1) Peningkatkan perencanaan program/proyek yang lebih mengarahkan pada pemecahan masalah pokok daerah dan sekaligus menunjang dan melengkapi program nasional di Daerah.
- (2) Peningkatan peranan Daerah dalam pengendalian pelaksanaan program/proyek sektoral sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan secara optimal, kerana adanya keterpaduan antara prioritas Daerah dan kepentingan Nasional.

c). Sumber Pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan sumber dana yang sepenuhnya dalam penguasaan Daerah.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai berikut : " Agar supaya Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka diwajibkan untuk mengali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ".

Adapun .....

Aadapun Sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- Hasil Pajak Daerah.
- Hasil Retribusi Daerah.
- Hasil Perusahaan Daerah.
- Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kebijaksanaan yang ditempuh antara lain :

(1) Pada Sektor Perpajakan dan retribusi Daerah dengan cara:

(a) Intensifikasi

Yaitu meningkatkan pendapatan Daerah yang telah ada misalnya :

- Peninjauan tarif - tarif yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman diganti dengan pembaharuan tarif.
- Meningkatkan kegiatan penagihan karena bertambahnya potensi.
- Penyempurnaan sitem pembayaran / pungutan diikuti dengan peningkatan pengawasan.
- Peningkatan pelayanan yang diikuti dengan perubahan tarif.
- Peningkatan daya tarik obyek wisata diikuti dengan operasional pengawasan.

(b) Ekstensifikasi

yaitu mengadakan penggalian sumber pendapatan baru dengan mendasarkan pada Peraturan perundang - perundangan yang berlaku dengan memperhatikan azas pemerataan atas beban masyarakat serta dampak negatif terhadap pengaruh lingkungan hidup.

Selain .....

Selain cara - cara tersebut yang ditempuh Pemerintah Daerah juga mengusahakan adanya perancangan pendapatan Daerah secara terpadu antara aparat yang terkait dan setiap tahun selalu diusahakan adanya kenaikan pendapatan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973 - 442 tahun 1988 Yunto Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1983 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan Daerah, retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan PBB untuk 9 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ditunjuk sebagai pilot proyek Manual Pendapatan Daerah ( Mapatda ) dan Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 061.1/830/1988 tanggal 15 Juli 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Sehubungan dengan hal itu diharapkan PADS akan meningkat terus dari tahun ke tahun.

(2)Kebijaksanaan yang menyangkut BUMD dan Unit - unit usaha lainnya.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah mengarahkan kepada pemantapan kedudukan fungsi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah dibentuk oleh Daerah untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah. Berhubung dengan itu maka Badan Usaha Milik Daerah harus didasarkan atas azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat atau dengan perkataan lain Badan Usaha Milik Daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan kearah sistem serbanegara ( etatisme ) dan monopoli sebagaimana telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Usaha Milik Daerah harus memperhatikan tata hubungan yang selaras dan serasi dengan usaha masyarakat serta saling menunjang.

Setiap .....

Setiap Pejabat dan atau Satuan Kerja Daerah yang membawahnya harus dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan peran serta terhadap pembiayaan anggaran Daerah Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan dari BUMD, berarti dapat mencerminkan dan merupakan tingkat ukuran efisiensi dari Badan Usaha tersebut.

BUMD harus lebih diarahkan dan diberi peranan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak menjadi beban Pemerintah daerah.

(3) Kebijakan mengenai tabungan Daerah maupun tabungan masyarakat. Usaha-usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tabungan Daerah / Masyarakat, yaitu dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah berdasarkan prinsip-prinsip :

- Hemat, efisien, tidak mewah.
- Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas / Lembaga / satuan Kerja Daerah serta menuju terciptanya konsistensi yang optimal.
- Dalam merencanakan proyek-proyek pembangunan berdasarkan skala prioritas dan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Keharusan penggunaan hasil produksi Dalam Negeri, sejauh ini dimungkinkan.
- Mengutamakan rekanan pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Pribumi.

Dengan berprinsip tersebut diatas maka tabungan daerah dapat meningkat sehingga pembiayaan untuk pembangunan dan perbandingan kemampuan anggaran daerah terhadap anggaran dari Instansi Atasan secara bertahap meningkat pula.

2). Luar Negeri

Dalam usaha .....

Dalam usaha memperlancar pelaksanaan pembangunan di daerah, dimanfaatkan pula sumber pembiayaan dari luar negeri. Bantuan dana luar negeri ini merupakan sumber pembiayaan pelengkap dana Dalam Negeri.

Bantuan ini dalam bentuk hibah maupun pinjaman dengan syarat yang tidak memberatkan.

bantuan yang ditujukan kepada Daerah baik dari Lembaga Pemerintah maupun organisasi Non Pemerintah pada umumnya berupa proyek yang menunjang langsung pembangunan Daerah.

Dari seluruh sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah tersebut diatas kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam usaha mengalokasikan dananya melalui APBD berpegang pada prinsip - prinsip :

- Tetap dalam kerangka mewujudkan sasaran pembangunan secara menyeluruh sebagaimana yang tertuang dalam GBHN.
- Anggaran yang berimbang Dinamis.  
Yang dimaksud adalah anggaran yang disediakan harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan realistis dan penetapan target PADS atas dasar realisasi tidak berdasarkan terget tahun yang lalu, sehingga dengan demikian anggaran setiap tahun meningkat secara proporsional dan realistis.
- Penggunaan Disiplin Anggaran.  
Berarti disini dalam penggunaan anggaran harus berprinsip:
  - Hemat, efisien, tidak mengurangi kualitas dan daya guna.
  - Berorientasi pada urgensi dan skala prioritas serta hasil-hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
  - Kemandirian  
Yaitu usaha-usaha peningkatan PADS dan ketepatan sumber yang tersedia.
  - Menjamin adanya keserasian dan keterpaduan antara proyek yang dibiayai dana APBD II, APBD I, APBN maupun danan bantuan dana bantuan dari luar negeri, serta adanya kesinambungan tahap-tahap pembangunan dari tahun ke tahun.

b. Non Anggaran .....

b. Non Anggaran Pemerintah.

1). Dalam Negeri

Sumber Pembiayaan pembangunan non anggaran pemerintah yang berasal dari dalam negeri berupa :

- a). Sumber pembiayaan berasal dari Dunia Usaha, meliputi antara lain :
- Usaha Negara
  - Usaha Swasta
  - Koperasi.

Usaha-usaha ini pada umumnya berupa investasi langsung kepada masyarakat, kredit perbankan dan juga dari tabungan masyarakat itu sendiri.

Guna lebih meningkatkan peran serta dunia usaha dalam melaksanakan investasi-investasi produktif, maka perlu pula diciptakan iklim dunia yang baik dan sejuk antara lain :

- (1) Upaya deregulasi dan debirokratisasi.
- (2) Meningkatkan bimbingan dalam berproduksi dan perbaikan mutu produksi dan perbaikan mutu produksi kepada para pengrajin/petani/nelayan dan lain sebagainya.
- (3) Membantu memperlancar penyediaan modal serta penyederhanaan prosedur pemberian kredit permodalan.
- (4) Menyajikan informasi yang lebih cepat dan tepat kepada produsen tentang profil daerah, wilayah zone industri, pemasaran dan lain sebagainya.
- (5) Membantu meringankan beban biaya produksi dengan cara selektif dan mencegah adanya pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku serta pedoman pelaksanaannya
- (6) Meningkatkan usaha promosi dan pemasaran yang efektif.
- (7) Meningkatkan pendapatan para petani/pengrajin produsen itu sendiri.
- (8) Khususnya bagi dunia usaha pariwisata agar diberikan kemudahan dalam hal perijinan sesuai instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 27 tahun 1987 dan mempersiapkan program dibidang pengembangan pariwisata khususnya bagi daerah-daerah yang potensial.

b). Sumber Pembiayaan .....

- b). Sumber Pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat. Usaha meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan suatu keharusan untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan teknis dan pembinaan kesadaran masyarakat.

Hal ini diperlukan karena kedadaran merupakan modal dasar pembangunan serta mendidik masyarakat agar mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Negara dan Bangsa.

Dalam rangka itu semua maka perlu peningkatan sumber dana dari masyarakat. Dengan demikian peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan dapat terwujud, khususnya dengan lebih mendayagunakan institusi keuangan/lembaga perkreditan di Daerah.

## 2). Luar Negeri.

Sumber pembiayaan dari luar negeri dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) yang diarahkan pada sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan dapat memperluas ekspor, memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi serta tidak membahayakan kepentingan ekonomi dan keamanan Nasional dan tidak menghambat perkembangan perusahaan Nasional.

Untuk itu perlu terus dikembangkan iklim investasi yang menggairahkan antara lain melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kepastian berusaha, kelancaran pelayanan serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.

## P E N U T U P

### A. PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi disegala bidang. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah yang dituangkan dalam Repelita Kelima Daerah ( 1989 / 1990 - 1993 / 1994 ) dengan mendengarkan dan memperhatikan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah merupakan tahap akhir dari Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 Tahun pertama, diharapkan dapat menyelesaikan pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Jangka Panjang Pertama dan dapat memantapkan landasan yang kokoh kuat guna memsauki tahapan pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua.

Pelaksanaan Kebijakan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam Rencana Operasional dalam bentuk Rencana Pembangunan ( Program program ) Tahunan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah lainnya dengan tetap memperhatikan kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, keserasian dan keseimbangan pembangunan diberbagai bidang.

Dalam meningkatkan tanggung jawab keuangan negara, seluruh aparat pengawasan yang ada wajib meningkatkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

### B. PERSYARATAN

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada akhirnya tergantung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan Negara baik aparat Pemerintah Pusat

maupun Daerah .....

maupun Daerah dan seluruh rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Hasil Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagai peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan sosial sehingga tercipta wilayah yang berketahanan dan sekaligus memperkuat ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang dalam mencapai masyarakat maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.